

PERATURAN TERKAIT PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh

I Ketut Darma Kertiya, NIM 1914101142

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan Presiden dalam memberikan Amnesti kepada narapidana yang seharusnya mendapatkan pertimbangan untuk mendapatkan Amnesti; dan (2) untuk memaparkan mekanisme jika seorang narapidana memerlukan pertimbangan dalam mendapatkan Amnesti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Amnesti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif dengan merujuk kepada undang-undang utama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Pasal (1), (2), (3) dan (4) dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1949 tentang pemberian amnesti dan abolisi, perundang-undangan terserbut sudah tidak berlaku atau sudah diperbarui namun tidak ada pembaruan mengenai amnesti maka dari itu perlu adanya pembaruan perundang-undangan yang mengatur tentang amnesti sehingga tidak menimbulkan kebingungan; dan (2) pertimbangan hukum yang harusnya dilakukan terkait pemberian amnesti ada 3 (tiga) yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jika dalam suatu kasus tidak mendapatkan keadilan seharusnya pengajuan mendapatkan amnesti bisa dilakukan jika menyangkut kepentingan negara didalamnya atau kasus yang dianggap dapat mempengaruhi keseimbangan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Amnesti, Pertimbangan Presiden, Mekanisme Pemberian Amnesti.

**REGULATIONS RELATED TO PROVIDING AMNESTY TO DEPRIANTS
IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA**

By

**I Ketut Darma Kertiya, NIM 1914101142
Law Department**

Abstract

This study aims to (1) determine the President's consideration in granting Amnesty to prisoners who should get consideration for getting Amnesty; and (2) to explain the mechanism if a prisoner needs consideration in obtaining Amnesty so that there is no abuse of authority in granting Amnesty. The type of research used in this study is by normative legal research method by referring to the main law, namely Law Number 11 of 1954 Articles (1), (2), (3) and (4) using 3 types of approaches, namely the statute approach, (conceptual approach) and case approach (case approach). The results of this study show that (1) to implement the provisions in Article 107 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia and to adjust the stipulation of the President of the Republic of Indonesia No. 14 of 1949 concerning the granting of amnesty and abolition, the legislation is no longer valid or has been updated but there is no update on amnesty, therefore it is necessary to update the legislation regulating amnesty so that it does not cause Confusion; and (2) there are 3 (three) legal considerations that should be carried out regarding the granting of amnesty, namely legal certainty, expediency, and justice. If in a case of not getting justice, the application for amnesty should be made if it concerns the interests of the state in it or cases that are considered to affect the balance in society.

Keywords : amnesty, presidential consideration, amnesty mechanism.

